

# hari ini

## Kapolsek Lengkong Iptu Bayu Hadiri Sosialisasi Netralitas ASN, TNI POLRI, dan Perangkat Desa dalam Pilkada Serentak 2024 di Kecamatan Lengkong

Sukabumi - [SUKABUMI.HARIINI.CO.ID](http://SUKABUMI.HARIINI.CO.ID)

Sep 19, 2024 - 11:30



*Kapolsek Lengkong Iptu Bayu Hadiri Sosialisasi Netralitas ASN, TNI POLRI, dan Perangkat Desa dalam Pilkada Serentak 2024 di Kecamatan Lengkong*

Lengkong, Sukabumi – Pada hari Kamis, 19 September 2024, bertempat di Aula Bumdesma Kp. Sindang Galih, Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya netralitas ASN, TNI/POLRI, Kades, dan perangkat desa dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024. Acara ini diselenggarakan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Lengkong dengan tujuan menjaga integritas dan netralitas dalam setiap tahapan Pilkada.

Kegiatan dimulai pukul 08.30 WIB dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Ketua Panwascam Yusuf Hidayat, Ketua PPK Cepi Wigarestu, Kapolsek Lengkong IPTU Bayu Sunarti Agustina, S.E., Babinsa Serma Harun, Ketua PGRI Asep Suherman, serta para kepala desa se-Kecamatan Lengkong. Acara ini juga menghadirkan narasumber Teguh Harianto yang memberikan paparan mengenai pentingnya menjaga netralitas dalam Pilkada.

Dalam sambutannya, Ketua Panwascam Yusuf Hidayat menyampaikan harapan agar seluruh ASN, TNI, POLRI, kepala desa, dan perangkat desa dapat menjaga netralitas demi terciptanya Pilkada yang aman dan kondusif. Ia juga mengajak seluruh stakeholder di Kecamatan Lengkong untuk bersinergi dalam setiap tahapan Pilkada agar proses berjalan dengan lancar.

Teguh Harianto sebagai narasumber menegaskan bahwa netralitas sangat penting dalam Pilkada, terutama mengingat saat ini terdapat dua pasangan calon Bupati Sukabumi dan empat calon Gubernur Jawa Barat yang sedang bersiap menghadapi pemilu. Ia juga mengingatkan adanya potensi pelanggaran dalam setiap tahapan Pilkada dan menekankan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, terutama oleh ASN, TNI, POLRI, dan perangkat desa.